

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Skripsi ini akan membahas tentang pengaruh Bali Democracy Forum (BDF) terhadap proses reformasi politik Myanmar ditahun 2012-2014. Bali Democracy Forum merupakan sebuah forum tahunan untuk bertukar pikiran atau pengalaman yang membahas tentang perkembangan demokrasi yang dirasakan oleh tiap negara peserta dengan tujuan promosi kerja sama regional mengenai isu demokrasi dan pembangunan politik diantara negara-negara di Asia. Ketika beberapa negara di Asia dijadikan sebagai subjek dalam mengembangkan demokrasi, posisi HAM, politik, dan pembangua beransur menjadi sesuatu yang dianggap kurang penting sama seperti masa Orde Baru yang disebabkan telah tercapainya stabilitas ekonomi. Dengan demikian, Asia menjadi sasaran utama dalam penyebaran demokrasi oleh BDF. Di samping itu, kawasan Asia dirasa berpotensi dan efektif dalam pengembangan ekonomi dan politik berkelanjutan secara maksimal.

Forum ini pertama kali diselenggarakan pada Desember 2008 oleh Indonesia era Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan ini dinaungi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia. Penyelenggaran BDF juga dibantu oleh Institute for Peace and Democracy (IPD) di Universitas Udayana di Bali yang ikut membantu untuk merealisasikan terselenggaranya BDF. Forum ini bersifat terbuka dan universal sehingga masih adanya kemungkinan negara yang tidak menganut demokrasi atau yang sedang menjalani transisi ke arah demokrasi hadir. Bahkan tidak hanya negara yang berada di kawasan Asia, tetapi dari belahan benua lain boleh menghadiri forum ini sebagai pengamat. Selain kepala negara, BDF juga mengundang para akademisi serta negarawan dari berbagai negara bertujuan menciptakan bervariasi gagasan demokrasi.

Telah terjadi perkembangan demokrasi di negara di Asia Tenggara seperti yang terjadi di Thailand, Filipina, dan juga Indonesia sejak dua dekade yang lalu. Walaupun terjadi gelombang demokratisasi di kawasan ini, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Myanmar. Seberapa kuat pengaruh demokrasi masuk di Myanmar, semakin pula pengaruh tersebut mendapat tantangan dari pihak militer.

Myanmar menganut bentuk pemerintahan Junta Militer dengan mengadopsi Sistem

Ekonomi Campuran (Sosialisme dan Kapitalisme) selama 50 tahun, terhitung sejak tahun 1962 pada saat terjadinya kudeta militer yang dilakukan oleh Jendral Ne Win terhadap kekuatan sah partai U Nu. Pada tanggal 30 maret 2011, Myanmar melantik presiden setelah dilangsungkannya pelihan umum. Sayangnya pemilu ini dinilai belum demokratis, karna meskipun telah dilakukan pemilihan umum Presiden terpilih masih berasal dari kalangan militer yaitu Jendral Thein Sein. Sehingga masih menimbulkan kecurigaan atas adanya campur tangan pemerintahan Junta Meliter terhadap hasil pemilu.<sup>1</sup>

Pada event Bali Democracy Forum II pada 2009 yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 Desember 2009, di Nusa Dua, Bali. “*Promoting Synergy beetween Democracy and Development in Asia : Prospect for Regional Cooperation*” yang menjadi tema pada pertemuan tersebut. Terdapat sebanyak 48 negara yang hadir sebagai peserta dan peninjau dalam acara yang kedua ini. Myanmar ikut hadir dan berpartisipasi dalam forum tersebut tanpa mengesampingkan sikapnya yang anti demokrasi. Arus demokrasi yang dibendung selama puluhan tahun mulai menunjukkan perkembangan, dengan adanya partisipasi negara yang dikuasi oleh junta militer dalam forum Bali Democracy Forum.

Bali Democracy Forum memegang prinsip *homegrown democracy* atau demokrasi berdasarkan pada nilai-nilai lokal baik Indonesia maupun di negara-negara lain tanpa menyalahkan atau membenarkan praktik tersebut.<sup>2</sup> BDF berupaya untuk menggabungkan antara kearifan lokal dengan demokrasi. Hal tersebut menjadikan BDF menarik, bahwa forum dialog tersebut mampu merubah persepsi dan memberikan nilai baru tentang demokrasi di Myanmar, yang sebelumnya gagal dalam melakukan usaha reformasi politik.

Pada periode 2012-2014 menjadi fokus yang lebih diperhatikan disebabkan intensitas bantuan IPD serta perubahan status. Sejak 2012, IPD telah aktif terlibat menyediakan pelatihan terhadap para elite dan masyarakat Myanmar yang bertujuan sebagai wujud dari kesadaran demokrasi. Pada 2014, IPD memisahkan dari lembaga yang dibawah oleh Kemlu dan menjadi

---

<sup>1</sup> Sita Hardiyah, “Proses Demokratisasi Myanmar menuju Pemilu Presiden 2012,” [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-III-24-II-P3DI-Desember-2011-60.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-III-24-II-P3DI-Desember-2011-60.pdf) (Kamis, 23 Mei 2019 pukul 16:26 WIB).

<sup>2</sup> Fuat Albayumi, *Peran Bali Democracy Forum (BDF) dalam Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014) 2

yayasan mandiri. Jaringan atau *networking* yang dimiliki IPD menjadi perubahan yang signifikan sehingga memerlukan batas periode.

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa Bali Democracy Forum memiliki kontribusi terhadap proses transisi demokrasi Myanmar. Jika dikaji secara mendalam guna mengetahui bagaimana sesungguhnya forum dialog dan pembelajaran mampu memberikan kontribusi terhadap persepsi demokrasi Myanmar. Dengan kata lain Bali Democracy Forum menjadi alat ukur negara lain untuk Indonesia terhadap sejauh mana pemahaman demokrasi yang dipahami oleh Indonesia sehingga mampu mengkonstruksi pemahaman demokrasi Myanmar.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat ditarik sebuah pokok permasalahan yaitu :

**Bagaimana Pengaruh Bali Democracy Forum terhadap proses transisi demokrasi Myanmar pada tahun 2012-2014?**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah, penulis menggunakan kerangka pemikiran “Konstruktivisme”.

Konstruktivisme mulai muncul dalam Hubungan Internasional ketika Nicholas Onuf memperkenalkan Konstruktivisme ditahun 1989 melalui “*World of Our Making*” yang kemudian dikembangkan oleh Alexander Wendt dalam “*Anarchy is What States Makes Of It*” pada tahun 1992. Nicholas Onuf dalam “*World of Our Making*” percaya bahwa pengetahuan ada didalam konstruksi sosial. Pengamat tidak pernah pada posisi netral, karena ide dan peristiwa bukan fenomena independen melainkan dibentuk. Dari proses ini ia menyimpulkan bahwa realitas internasional juga hasil dari konstruksi manusia. Berdasarkan hal tersebut, konstruktivisme memiliki kemiripan dengan rational choice, yakni penawaran kerangka berpikir yang berguna dalam memberi penjelasan mengenai interaksi sosial. Konstruktivisme berupaya memberi penjelasan mengenai bagaimana fenomena sosial dapat berpengaruh terhadap fenomena politik.

Terdapat dua gagasan kunci Konstruktivisme yang relevan bagi studi HI. *Pertama*, keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *sahred*

*ideas* (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) dibandingkan dengan kekuatan material. Keyakinan tersebut mempresentasikan perspektif idealis terutama sebelum perang dingin. *Kedua*, kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh *shared ideas* daripada faktor alam. Artinya tindakan setiap aktor tidak semata-mata ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka akan tetapi lebih dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan di sekitarnya (struktur sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya). Pada dasarnya Konstruktivisme bukanlah teori politik, melainkan teori sosial yang tidak dapat berdiri mandiri dalam menganalisa fenomena Hubungan Internasional. Konstruktivisme merupakan teori sosial yang berusaha menjelaskan bagaimana fenomena sosial mampu mempengaruhi fenomena politik.

Konstruktivisme memiliki definisi yang luas yang mengakibatkan para konstruktivis tidak menetapkan kesepakatan terhadap definisi serta tahapan dalam penelitian. Berdasarkan pemahaman identitas dari Sikkink dan Finnemore sebagai perilaku negara adalah hasil konstruksi sosial yang terjadi antara lingkungan dalam dan luar negeri.<sup>3</sup> Identitas diartikan oleh Wendt sebagai bentuk pemahaman yang bersifat subjektif mengenai bagaimana seorang aktor mampu memahami dirinya dan bagaimana aktor lain mampu memahaminya. Wendt juga berpendapat bahwa salah satu alasan dari aktor bertindak akibat adanya kehadiran dari identitas.<sup>4</sup>

Kowert dan Legro menanggapi hal tersebut dengan menyebut pendekatan identitas dengan sebutan *catch-all term* karna dimensinya yang luas, sejarah, keadaan lingkungan, norma domestik dan internasional, serta ideologi, (Theodor tudoroiu, 2004) Sehingga wajar jika para konstruktivis masih banyak definisi mengenai identitas. Asumsi diatas menjadi acuan konstruktivisme bahwa dengan memahami identitas suatu negara, maka perilaku negara dapat diprediksi.

Positivisme memiliki perbedaan dengan neo-realis dan neo-liberalis. Keduanya memiliki asumsi struktur internasional merupakan faktor yang mampu menentukan tingkah laku dari subjek. Sedangkan positivisme beranggapan bahwa struktur internasional merupakan distribusi diskursus dalam semua bagian. Hadirnya konstruktivisme turut mengakui eksistensi serta peran konstitutif agen dan struktur secara material atau idesional. Dengan kata lain, konstruktivisme opini dihasilkan

---

<sup>3</sup> Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, "Taking Stocks: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics", *Journal Political Sciences*, Vol. 4 (2001), 392-393

<sup>4</sup> Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, (Australia: Cambridge University Press, 1999) 224

oleh subjek kemudian mengalami proses dialog baru kemudian membentuk suatu norma atau tatanan.

Kehadiran konstruktivisme telah menawarkan cara pandang yang berbeda dari teori lain dalam memandang tatanan sosial, kepentingan, anarkisme, dan demokrasi bukanlah hal *given* melainkan hasil dari hubungan antara ide dan norma.<sup>5</sup> Dengan adanya pendekatan ini mengakibatkan isu baru yang lahir dalam studi Hubungan Internasional.

Istilah *share ideas* dan *intersubjective meaning* sering dipakai konstruktivisme menganalisis peran ide dan materi ketika membentuk sebuah realita sosial. Wendt menjelaskan sebelum saling mempengaruhi identitas bahwa ide yang disebarkan mampu membentuk sebuah identitas dan kepentingan.

Jika dikontekstualisasikan dengan permasalahan ini, demokrasi berfungsi sebagai norma yang mampu membantu tingkah laku suatu bangsa (Myanmar). Sedangkan BDF merupakan alat penyebaran norma (demokrasi) yang sesuai dengan pemahaman Indonesia tentang norma yang disebarkan.<sup>6</sup> Pada dasarnya subjektivitas terkandung dalam ide yang disebarkan oleh para aktor. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan ide akan bersifat objektifitas jika banyak yang mengakui sehingga menjadi sebuah pemahaman umum.

Dari pemahaman yang dipaparkan sebelumnya, tahapan penyebaran ide menuntut munculnya sebuah pemahaman yang seragam. Istilah pengetahuan umum atau *common knowledge* yang dikemukakan oleh Wendt yakni sebuah pengetahuan rasionalitas yang sama, preferensi, dan kepercayaan terkait sesuatu yang ada di luar aktor. Dalam membentuk kesepakatan bersama tidak diperlukan kebenaran, hanya diperlukan keyakinan. Pengetahuan bersama inilah yang nantinya turut menentukan kualitas hubungan antar aktor.

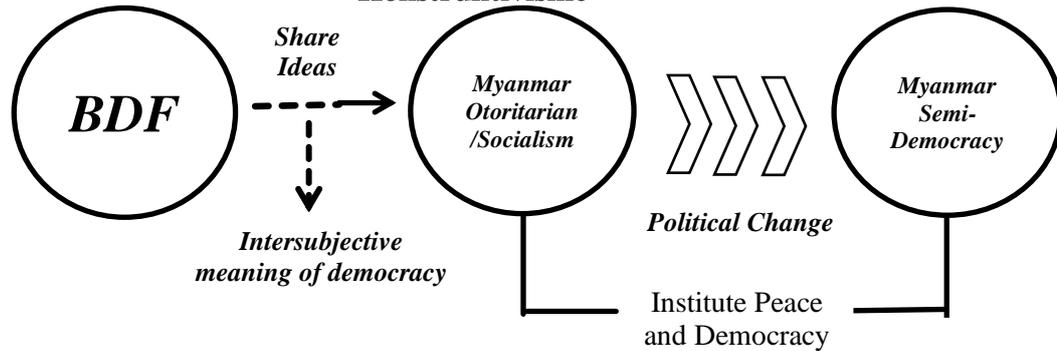
Kapabilitas identitas memiliki andil dalam menentukan bagaimana norma baru dapat diterima oleh aktor lain. Peluang terbesar akan ide yang tersebar dapat diterima oleh aktor lain dimiliki oleh aktor dengan identitas *power* yang kuat sehingga kesuksesan dari *share ideas* ditentukan oleh hirarki identitas aktor.

---

<sup>5</sup> Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) hlm 307

<sup>6</sup> Wendt, *Social Theory of International*, 1

**TABEL I. Skema Pengaruh BDF terhadap Myanmar Berdasarkan Perspektif Konstruktivisme**



Sumber: Ilustrasi Penulis

Myanmar yang terlibat dengan BDF yang ikut andil dalam menjalankan transisi pemerintahan, memiliki potensi mengimplementasikan demokrasi yang sesuai dengan yang diperoleh BDF sehingga konstruktivisme dirasa pendekatan yang cocok untuk menganalisis bagaimana norma demokrasi (ide) dapat disebarkan kepada Myanmar melalui Bali Democracy Forum (materil).

### **E. Argumen Penelitian**

Bali Democracy Forum berpengaruh terhadap proses demokratisasi Myanmar dengan melakukan berbagai agenda pengembangan demokrasi yang disepakati dalam BDF dibantu oleh Institute Peace and Democracy pada priode 2012-2014.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang memiliki fokus memperdalam pemahaman mengenai fenomena daripada menjabarkan bagian permukaan dari sampel yang besar dari populasi. Dibahas secara mendalam tujuan dari penelitian kualitatif adalah menyajikan secara menyeluruh gambaran, komprehensif, dan menyajikan hasil analisis berdasarkan pemaparan informasi yang telah tersaji.

Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder atau data yang didapat melalui tinjauan pustaka terhadap buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah serta penggunaan internet dengan pembahasan yang serupa atau membahas tentang komponen terkait.

### **G. Sistematika Penelitian**

Agar penelitian ini dapat dipahami secara komprehensif, maka skripsi ini disusun dalam lima

bab dengan rinci. BAB I, akan membahas mengenai pendahuluan penelitian. Pendahuluan dari penelitian ini terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen penelitian, dan metode penelitian. Pada BAB II akan meninjau BDF dan IPD dari berbagai aspek. Pembahasan dimulai dari hakikat BDF dan IPD, Indonesia dan demokrasi, hingga BDF sebagai kebijakan demokratisasi di Indonesia. Pada BAB III akan membahas tentang jatuh bangun demokrasi Myanmar. Mulai dari situasi domestik, demokrasi, serta sistem otoriter Myanmar. BAB IV yaitu Implementasi ide dan norma BDF bersama IPD dalam membantu proses demokratisasi Myanmar periode 2012-2014 akan mengkorelasikan antara BAB I dan BAB II. Pada BAB ini akan paparkan peran BDF dan IPD sebagai promotor norma demokrasi ke Myanmar. Dan BAB V sebagai Penutupan dan menjadi kesimpulan dari penelitian.